

SKRIPSI
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 JO UNDANG- UNDANG NOMOR 45
TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN**

(Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum)

Oleh :

ZAMMILA RIZKA

1410112097

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA (PK IV)**


PEMBIMBING I : Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING II : Lucky Raspati, S.H., M.Hum.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2018

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: ZAMMILA RIZKA	No. Alumni Fakultas:
	a)Tempat/Tanggal Lahir: Batuhampar, 04 Oktober 1995		f)Tanggal Lulus : 14 Mei 2018
b)Nama Orang Tua: Nasrul Can dan Armah		g)Predikat Lulus : Dengan Pujian	
c)Fakultas : Hukum		h) Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan	
d)Program Kekhususan : Hukum Pidana		i) IPK :3, 68	
e) No.BP : 1410112097 Akabiluru Kabupaten 50 Kota		j) Alamat: Desa Batuhampar, Kecamatan	

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 JO UNDANG- UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN
(Zammila Rizka, 1410112097, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana), 58 Halaman, 2018)

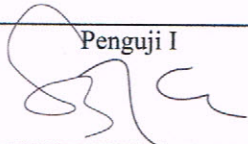
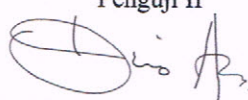
ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sekitar 17.504, dimana 2/3 bagian dari keseluruhan wilayah kedaulatan Indonesia adalah lautan. Maraknya terjdai pencurian ikan dan tindak pidana di bidang perikanan berdampak merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Penegakan hukum dibidang perikanan terutama dinilai belum maksimal karena hanya menyentuh kalangan awak kapal tanpa menangkap otak pelaku yang sesungguhnya, yaitu korporasi yang *membackingi* kegiatan tersebut. berdasarkan hal ini penulis merumuskan dua permasalahan yaitu Bagaimana pertanggung jawaban korporasi dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Undang-Undang Tentang Perikanan)dan Bagaimana perbandingan pengaturan korporasi dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun hasil penelitian yaitu pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang- Undang Tentang Perikanan yaitu korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana, tetapi korporasi itu sendiri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Hal ini dapat dilihat dari sumirnya rumusan pasal 101 karena yang dapat dimintai pertanggungjawabannya adalah pengurusnya saja dengan pemberatan ditambah 1/3 pidana pokok denda.. Perbandingan pengaturan korporasi dalam Undang- Undang tentang Perikanan dengan Undang- undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi terdapat perbedaan dan persamaan, sehingga disimpulkan bahwasanya rumusan pertanggungjawaban korporasi dalam undang-undang perikanan lebih sederhana dibandingkan dengan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga pada saat penulis menulis penelitian ini belum ditemukan korporasi yang di jerat dengan undang-undang perikanan dalam kasus pidana sedangkan undang- undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjerat korporasi pertama kali pada tahun 2010

Kata Kunci : Korporasi, Perikanan , Pertanggungjawaban

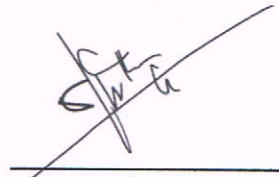
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Februari 2018. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan		Penguji I		Penguji II
Nama Terang	Dr. Siska Elvandari, S.H.,M.H		Diana Arma, S.H.,M.H	

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana : **Dr. H. A. Irzal Rias, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: